

## ABSTRAK

Anak dianggap sebagai entitas rentan sehingga perlu mendapatkan perlindungan, termasuk ketika anak berkedudukan sebagai pelaku tindak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum. Alat perlindungan yang diberikan kepada Anak dapat melalui pidana pokok pada UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satu jenis sanksi pokok pada Anak yang dapat memberikan persiapan positif untuk masa depan anak ialah sanksi pidana pelatihan kerja. Pidana pelatihan kerja masih menjadi jenis penjatuhan sanksi pidana yang tergolong rendah daripada pidana penjara sebagai upaya terakhir dalam penjatuhan sanksi bagi anak. Permasalahan lain yang datang dari penjatuhan sanksi pelatihan kerja, terletak pada peran aparat penegak hukum dalam merumuskan dan mempertimbangkan penjatuhan pelatihan kerja yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui kebijakan kriminal tentang sanksi pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum dan analisis yuridis implementasi sanksi pidana pelatihan kerja bagi anak yang berkonflik dengan hukum (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN PLK). Untuk menjawab permasalahan tersebut, menggunakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan doktrinal. Hasil yang diperoleh dari penelitian bahwa terjadi ketidaksesuaian dalam segi waktu pelaksanaan dan laporan Penelitian Masyarakat (Litmas) yang tidak memuat indikator yang telah ditentukan oleh Surat Edaran Nomor PAS6. PK.01.05.01-573 Tahun 2014. Berdasarkan hal tersebut, saran yang dapat diberikan ialah evaluasi dalam tubuh aparat penegak hukum khususnya hakim dan Pembimbing Kemasyarakatan khusus anak dan sinergisitas antara Pembimbing Kemasyarakatan dan Majelis Hakim terhadap pemberian rekomendasi hasil Litmas.

**Kata Kunci:** Anak yang Berkonflik dengan Hukum; Pidana Pelatihan Kerja; Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN PLK.

## **ABSTRACT**

*Children are considered vulnerable entities and therefore receive protection, including when the child is a perpetrator of a criminal offense or a child in conflict with the law. Protective equipment given to children can be subject to the basic punishments contained in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. One of the main types of sanctions for children that can provide positive awareness for the child's future is the criminal sanction of job training. Job training punishment is still a type of criminal punishment that is relatively lower than imprisonment as a last resort in punishment for children. Another problem that comes from training work penalties lies in law enforcement officials considering and considering work penalties that are not in accordance with applicable regulations. The aim of this research is to determine criminal policies regarding criminal sanctions for children who are in conflict with the law and a juridical analysis of the implementation of work criminal sanctions for children who are in conflict with the law (Decision Study Number 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN PLK). To answer this problem, qualitative research was used with a doctrinal approach method. The results obtained from the research were that there was a discrepancy in half the implementation time and the Community Research (Litmas) report did not contain the indicators determined by Circular Letter Number PAS6. PK.01.05.01-573 of 2014. Based on this, suggestions that can be given are evaluations within law enforcement officers, especially judges and Community Counselors specifically for children and synergy between Community Counselors and the Panel of Judges regarding the provision of recommendations for Litmas results.*

**Keywords:** *Children in Conflict with the Law; Job Training Crime; Juvenile Criminal Justice System; Court Decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN PLK.*